

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Definisi peranan yang merupakan perpanjangan dari kata peran, memiliki makna suatu hal yang tergabung dalam suatu bagian atau memegang pimpinan utama. Suatu hal yang berarti positif dan dapat mempengaruhi satu dan lain hal antar sesama merupakan definisi dari peranan. Rumusan yang memiliki peran untuk membatasi perilaku dari para pemegang kedudukan merupakan definisi peran yang diungkapkan oleh Biddle dan Thomas. Selain itu, peran bisa didefinisikan sebagai rangkaian perilaku yang muncul dari jabatan yang memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan.

Peranan suatu negara mempunyai tujuan mempertanggung jawabkan keterlibatan nya sebagai aktor yang memiliki kepentingan.¹Bagian ini bermaksud untuk mengkaji sejarahnya berdasarkan alasan bahwa untuk memahami masa kini dan masa depan pasca konflik, penting untuk mengetahui masa lalunya. Bagian ini juga akan menjelaskan secara singkat sifat konflik dalam upaya untuk menunjukkan kompleksitasnya.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Peranan ambisi imperialis Rusia dimulai pada awal abad kesembilan belas(19) ketika dasar-dasar kebijakan ekspansionis Rusia ditetapkan, yang memuncak dalam penciptaan citra kerajaan multi-etnis (Derzhava) yang menjadi memimpin ideologi politik di abad kedua puluh(20) dan mendominasi mentalitas Rusia selama hampir satu abad.²

Wilayah Kaukasus secara historis memiliki kepentingan simbolis dan geostrategis bagi Rusia sebagai yang pertama akuisisi teritorial dalam ekspansi ke selatan dan pintu gerbang ke Timur Tengah. Nostalgia untuk masa lalu Rusia yang gemilang dan terutama Uni Soviet, seluruh keruntuhan yang diklasifikasikan Putin sebagai bencana geopolitik terbesar abad kedua puluh memunculkan alasan atau pembenaran untuk keberadaan yang dikenal (*raison d'etre*)³ pasca perang dingin.

Rusia memperlakukan pasca-Soviet secara taktis menghubungkannya dengan masalah kepentingan nasional, sehingga memahami segala tindakan eksternal terhadap wilayah tersebut sebagai campur tangan yang tidak diinginkan dalam urusannya sendiri. Kekhawatiran bahwa keterlibatan aktor internasional lainnya mungkin merupakan ancaman bagi aspirasi kekuatan besar Rusia telah mengakibatkan penerapan instrumen Rusia tanpa pandang bulu dengan alasan bahwa kebijakan luar negerinya berakhir membenarkan berbagai cara.

² Armenia, Azerbaijan and Russia Sign Nagorno-Karabakh Peace Deal. (2020, November 10). BBC News. (<https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564>. Diakses pada 7 November 2021).

³ Baser, B., & Feron, E. (2020, November 13). “Nagorno-Karabakh, Diaspora Communities, and How Tensions Boiled Over on Far Away City Streets. The Conversation.” (<https://theconversation.com/nagorno-karabakh-diaspora-communities-and-how-tensions-boiled-over-on-far-away-city-streets-149930>. Diakses pada 7 November 2021).

Konflik Nagorno-Karabakh memenuhi syarat sebagai konflik etnis yang paling persisten yang dimaksud sikap gigih yang terus menerus dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih besar. Konflik di suatu wilayah, yang ditandai dengan beberapa sengketa wilayah. Konflik tersebut secara simbolis dapat digambarkan sebagai bentrokan antara hukum integritas teritorial Azerbaijan dan Nagorno-Karabakh dalam menentukan nasib yang mereka lalui.

Penyebab konflik sering dikaitkan dengan kebijakan pembagian dan aturan Stalin untuk mentransfer potongan tanah ke satu Republik Soviet sambil memastikan bahwa benar dihuni oleh minoritas yang signifikan dari yang lain digunakan sebagai anteknya,⁴ dalam upaya untuk membuat mereka terpecah dan bermusuhan satu sama lain dan dengan demikian untuk mengendalikan bagian konstituen Uni Soviet dengan lebih mudah dan memastikan bahwa mereka tidak akan dapat menantang otoritasnya.

Pemindahan wilayah berpenduduk mayoritas Armenia ke Azerbaijan Soviet pada tahun 1923 setelah tiga tahun konsentrasi menciptakan ketegangan lebih lanjut antara kedua negara. Asal mula konflik bahkan lebih mengakar sejak abad kesembilan belas (19) ketika pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan atas wilayah yang bersangkutan sudah ada.

⁴ Castells, M. (2010). "Communal Heavens: Identity and Meaning in the Network Society". In *The Power of Identity* (pp. 5–70). Blackwell Publishing Ltd. (<https://doi.org/10.1002/9781444318234.ch1>). Diakses pada 7 November 2021).

Konflik Nagorno-Karabakh dimulai pada tahun 1988, ketika perselisihan yang belum terlupakan itu muncul kembali diberikan dorongan oleh gerakan kemerdekaan yang didirikan oleh sebagian besar penduduk Armenia di daerah yang menuntut penyatuan dengan Soviet Armenia pada tahun yang sama. Aspirasi ambisius ini mendapatkan momentum di Era Gorbachev dalam konteks reformasi perestroika dan glasnost.⁵

Dengan demikian, perselisihan berkembang menjadi konflik kekerasan dan tidak lama kemudian, menjadi perang penuh antara Armenia dan Azerbaijan. Kemudian pada tahun 1994, gencatan senjata ditandatangani di Bishkek di bawah perantara Rusia. Ini namun, tidak menyelesaikan konflik tetapi membekukannya selama bertahun-tahun yang akan datang. Sebuah deklarasi kemerdekaan Nagorno Karabakh diikuti pada tahun 1997.⁶ Republik memproklamirkan diri, bagaimanapun, tetap tidak diakui secara internasional.

Tinjauan historis ini, meskipun sebagian besar deskriptif, diperlukan untuk sepenuhnya memahami kompleksitas dari konflik dan hambatan yang selama beberapa dekade menghambat penyelesaiannya yang sukses. Kompleksitas ini berasal tidak semata-mata dari akar sejarahnya yang dalam dan fakta bahwa hingga saat ini, dua pihak utama yang terlibat, yaitu Armenia dan Azerbaijan, tetap menganggap konflik itu sebagai permainan.

⁵ Chernobrov, D., & Wilmers, L. (2019). "Diaspora Identity and a New Generation: Armenian Diaspora Youth on the Genocide and the Karabakh War". Hal 1–16. (<https://doi.org/10.1017/nps.2019.74>. Diakses pada 7 November 2021).

⁶ Castells, M, op.cit,92

Peranan Rusia telah berkembang sejak awal konflik dan telah dicirikan oleh berbagai kecenderungan sepanjang sejarah pasca Perang Dingin. Perbandingan analisis kebijakan Rusia yang berkembang terhadap konflik dengan menggunakan kerangka analitis tiga perbedaan periode, yaitu, awal konflik hingga akhir Perang Dingin, era Yeltsin, dan kepresidenan Putin hingga hari ini. Ketiga periode ini dipilih karena dengan mudah mengidentifikasi perbedaan pola peranan Rusia terhadap konflik.⁷

Periode yang pertama pada awal konflik hingga akhir Perang Dingin 1988-1991, Seperti yang dipertahankan Abushov, peranan Rusia terhadap Nagorno-Karabakh pada awal konflik dapat digambarkan sebagai tidak konsisten dan tidak memiliki strategi yang rumit. Hal ini mengacu pada fakta bahwa dalam konteks Perang Dingin, konflik tersebut murni internal bagi Uni Soviet dan kekhawatiran bahwa hal itu dapat terjadi meningkatkan dan mengancam keamanan persatuan dalam skala yang terbatas karena kedua pihak yang berkonflik itu keduanya berada dalam kendali langsung Uni Soviet dan oleh karena itu, lebih mudah untuk menekan mereka atau menjaga mereka dari dekat dalam lingkup pengaruhnya dan dengan demikian mengandung konflik.

Posisi awal Rusia ketika kepentingan politik luar negeri Rusia belum dijabarkan secara jelas adalah memberikan bantuan ke pihak Armenia, posisi yang didasarkan pada kedekatan identitas, budaya, agama, dan bahasa seperti pada

⁷ Grebennikov, M. (2013). "The Puzzle of a Loyal Minority: Why Do Azeris Support the Iranian State?", *The Middle East Journal*, hal, 64–76.

pertimbangan strategis.⁸ Perspektif ini, tetap diperdebatkan karena, konflik Nagorno-Karabakh telah menjadi isu yang memecah belah sehingga posisi para ilmuwan politik sering berprasangka buruk terhadap satu atau pihak lain yang bersengketa, yang membuat sulit untuk menentukan masuk akal nya mereka.

Hubungan Uni Soviet, hingga pembubarannya cenderung berpihak pada penguasa Republik yang harus berurusan dengan wilayah sulit diatur, seperti Nagorno-Karabakh, mendukung Azerbaijan. Terlepas dari pandangan yang kontras ini, menjelang akhir Perang Dingin, dapat mengamati apa yang akan dilakukan untuk tujuan ini analisis didefinisikan sebagai evolusi pertama yang terlihat dalam pendekatan kebijakan luar negeri Rusia,⁹ yaitu ketika Rusia mulai menentukan strategi yang jelas untuk wilayah Kaukasus Selatan yang pada gilirannya meletakkan dasar-dasar yang berkelanjutan strategi menuju konflik.

Runtuhnya dan pecahnya Uni Soviet pada musim gugur 1991 menghasilkan kemerdekaan Republik Uni Soviet, antara lain Armenia dan Azerbaijan, yang pada gilirannya mengubah konflik dari masalah internal Soviet menjadi satu antar negara bagian. Hal ini membawa ke periode berikutnya, yaitu era Yeltsin.

Periode kedua, era Yeltsin 1991-1999, melihat perubahan besar dalam peranan Rusia terhadap wilayah Nagorno- Karabakh. Perubahan menjadi nyata setelah definisi strategi kebijakan luar negeri pada tahun 1992 ketika Rusia mengembangkan kepentingan strategis dalam instrumentalisasi sengketa.

⁸ *Ibid* 76

⁹ *Ibid* 78

Setelah kehilangan kejayaan Sovietnya, Rusia segera merasa khawatir tentang kemampuannya untuk mempengaruhi politik dan proses ekonomi di bekas Republiknya dan untuk memastikan bahwa tidak akan ada campur tangan pihak lain yang berkepentingan.

Rusia melihat peluang untuk mengejar tujuan politiknya. Menggunakan perselisihan sebagai pengungkit terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam niat untuk mempertahankan kendali atas mereka setelah kemerdekaan dengan memberikan tekanan dan memaksakan kondisi yang menguntungkan aturannya sendiri. Nagorno-Karabakh digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mengendalikan Azerbaijan memasuki Commonwealth of Independent States (CIS)¹⁰ dan menyebarkan pangkalan militer ke perbatasan dengan Turki dan Iran.

Menjamin bahwa Azerbaijan akan tetap berada dalam lingkup pengaruhnya dan untuk menghindari intervensi eksternal yang tidak diinginkan. Rusia menganggapnya sebagai tugasnya untuk mengambil peran sebagai bertanggung jawab atas penyelesaian konflik dan sebagai sarana untuk tujuan ini, lelah untuk menjaga internasional masyarakat keluar darinya dengan membatasi peran organisasi internasional dan aktor terkait lainnya.

Untuk menjamin posisi kepemimpinannya dalam pengelolaan konflik, Rusia menangani dengan taktik yang cerdas membuat proposal sepihak kepada pihak-pihak yang bertikai untuk gencatan senjata, yang secara langsung bersaing

¹⁰ Ismailzade, F. (2011). "The Nagorno-Karabakh Conflict: Current Trends and Future Scenarios". Istituto Affari Internazionali (IAI).

dengan proposal internasional Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, sebuah strategi yang sengaja dirancang di antara pihak yang memiliki konflik sehingga mereka memiliki kesempatan dalam berbelanja untuk mendapatkan penawaran terbaik. Rusia, memastikan bahwa proposal akan lebih disukai daripada tawaran alternatif dan dengan demikian dalam kata-kata Yeltsin, itu akan dikabulkan kekuatan khusus sebagai penjamin perdamaian dan stabilitas di wilayah bekas Uni Soviet.¹¹

Pertimbangan energi adalah kepentingan penting lainnya yang coba dilindungi oleh Rusia dengan menggunakan konflik sebagai pengungkit untuk mencegah pembangunan pipa yang dimaksudkan untuk menghubungkan Laut Kaspia dengan pelabuhan Mediterania, yang membuktikan upaya yang salah perhitungan. Rusia juga mengintensifkan hubungannya dengan yang lebih rentan dan ekonomis sangat terpengaruh oleh pihak perang dalam konflik, Armenia, dengan memasoknya dengan senjata.¹² Dengan demikian bisa membuatnya tetap tergantung, sebagai akibatnya Armenia semakin mulai menganggap Rusia sebagai penjamin keamanan.

Rusia telah berkontribusi kuat terhadap dimulainya kembali permusuhan langsung dan penandatanganan gencatan senjata 1994. Konflik di Rusia dapat menyebabkan limpahan dan dengan demikian berpotensi menimbulkan ancaman langsung bagi keamanannya, di sisi lain mempertahankan konflik beku di wilayah

¹¹ *Ibid* 48

¹² Kramer, A. E. (2020). "Armenia and Azerbaijan: What Sparked War and Will Peace Prevail?", The New York Times.

di mana Rusia akan bertindak sebagai mediator kunci adalah hal yang strategis bagi kepentingan kebijakan luar negerinya. Resolusi damai yang stabil dari konflik Nagorno-Karabakh saat itu belum menjadi hasil yang diinginkan oleh Rusia di era Yeltsin.

Rusia menghilangkan kepentingan politik dan akan melemahkan posisinya sebagai pemain regional utama dan akibatnya kemampuannya untuk mempengaruhi masa depan perkembangan di wilayah tersebut. Rusia dalam peranannya telah berhasil memanfaatkan konflik Nagorno-Karabakh sebagai aset kebijakan luar negeri yang telah melayani kepentingan jangka pendeknya di kawasan selama zaman Yeltsin.¹³

Periode ketiga, masa jabatan presiden pertama Putin pada tahun 2000-2014, Konflik Nagorno-Karabakh yang di dalamnya dilibatkan Rusia dalam konflik tersebut adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan dari Yeltsin kepada Putin. Sebagai akibat dari kebijakan Putin tentang sentralisasi administrasi negara. Peranan terhadap wilayah Kaukasus Selatan menjadi lebih koheren dan seragam tanpa ciri khas divisi internal periode berjalan antara kementerian Luar Negeri dan Pertahanan. Kebijakan kohesi Rusia terhadap kawasan bahwa, Putin adalah salah satu dari orang di Rusia yang memiliki perspektif yang jelas tentang masa lalu dan masa depan negaranya dan visi yang jelas tentang arah asingnya kebijakan terhadap CIS, tidak ingin melihat resolusi politik jangka panjang dari konflik tersebut.

¹³ Minasyan, S. (2016). *The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context of South Caucasus Regional Security Issues: An Armenian Perspective*. hal. 1–9. (<https://doi.org/10.1080/00905992.2016.1237938>. Diakses pada 7 November 2021)

Di era pasca-Yeltsin, Rusia terus menjadi kekuatan regional yang mampu mempengaruhi dinamika proses tersebut. Dibawah kepemimpinan Putin dan terutama setelah dia mulai memanfaatkan sumber daya energi Rusia sebagai sarana untuk melakukan kebijakan luar negeri, Rusia menjadi lebih percaya diri dalam kebijakannya terhadap ruang pasca-Soviet.¹⁴ Memang keinginannya untuk membangun kembali Rusia Raya yang akan kuat dan percaya diri di dalam negeri dan pemimpin yang lebih tegas bekas Republik Uni Soviet telah secara eksplisit menjadi kekuatan pendorong di belakang kebijakan Rusia dekat luar negeri.

Putin telah mengambil sikap yang lebih netral terhadap pihak-pihak yang berkonflik dibandingkan dengan sikapnya pendahulunya sebagai akibatnya Rusia mulai bertindak sebagai mediator nyata sebagai lawan dari pihak konflik. Namun demikian, dugaan pergeseran arah kebijakan Rusia seperti itu harus diperlakukan dengan terang-terangan. Pendekatan Rusia terhadap Kaukasus Selatan tidak pernah terancam atau tidak memihak. Kenyataannya, mengklaim ketidakberpihakan kebijakan Presiden Putin terhadap wilayah tidak lebih dari strategi jalan tengah nyaman yang disamarkan dengan baik untuk duduk di dua kursi, artinya memperlakukan sama dua pihak yang bertikai. Asumsi ini terbukti valid dengan fakta bahwa sejak 2007, Moskow telah menjadi pemasok senjata utama bagi kedua belah pihak dan antara tahun 2007 dan 2011, ia bertanggung jawab atas 55 persen persenjataan Azerbaijan impor dan 96 persennya dari Armenia.

¹⁴ *Ibid*

Dengan demikian masa jabatan presiden pertama Putin, sebuah resolusi akhir dari konflik itu bukan dalam kepentingan politik Rusia, atau dalam kepentingan ekonomi strategisnya di kawasan itu dan oleh karena itu, pilihan yang menguntungkan bagi Rusia adalah mempertahankan status quo. Sebuah solusi politik potensial untuk sengketa Nagorno Karabakh mungkin akan menghasilkan kerjasama ekonomi masa depan antara Armenia dan Azerbaijan, yang akan mengurangi ketergantungan kuat Armenia sebagai satu-satunya sekutu Rusia di kawasan pada Rusia dan dengan demikian melemahkan pijakannya di wilayah tersebut.

Ini merupakan asumsi bahwa kebijakan Rusia saat ini di Kaukasus Selatan masih didorong oleh logika Soviet lama yang disebutkan di atas bahwa dengan menyandingkan dua pihak yang bertikai, sehingga memastikan bahwa permusuhan antara mereka tetap, Rusia dapat dengan mudah mengendalikan mereka dan menjamin monopolinya atas industri tertentu di kawasan itu dan terutama pasokan energi.

Peranan Rusia yang disebutkan di atas telah mempengaruhi resolusi konflik. Sementara, seperti yang telah dibahas sebelumnya, Rusia berkontribusi signifikan untuk mengakhiri permusuhan dan menengahi gencatan senjata pada tahun 1994, sering dituduh menanggung bagian terbesar untuk menjaga konflik yang belum terselesaikan sebagai cara untuk memperluas kendalinya ke wilayah tersebut.

Mengaitkan peran penting seperti Rusia dalam menghambat resolusi Sengketa Nagorno-Karabakh merupakan interpretasi situasi yang disederhanakan dan dilebih-lebihkan karena adanya faktor lain yang mencegah penyelesaiannya. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa fakta bahwa adalah kepentingan Rusia untuk mendukung status quo sebagai lawan dari resolusi permanen tidak secara otomatis berarti bahwa itu yang harus disalahkan atas kebuntuan ketiga periode presiden Rusia.

Penilaian situasi yang realistis menunjukkan bahwa bahkan melalui Rusia tetap menjadi pemain regional yang penting dalam ruang pasca-Soviet, wilayah yang masih menjadi salah satu pertimbangan terpenting dalam kebijakan luar negerinya, Armenia dan Azerbaijan tidak tertarik pada resolusi terlebih dahulu karena mereka juga telah mencoba untuk memperalatnya untuk memperoleh keuntungan politik. Status quo adalah situasi optimal karena setiap penyimpangan akan memberikan keseimbangan yang menguntungkan satu pihak dalam konflik sehingga merugikan pihak lain, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah.

Rusia mempunyai hubungan yang baik dengan Armenia dalam unsur hubungan ekonomi dan keamanan. Armenia yang memiliki kepercayaan pada Rusia karena dapat menjamin keamanan pada Turki dan Azerbaijan menjadi faktor utama Armenia dan Rusia untuk mempertahankan hubungan, masyarakat Armenia bertanya-tanya mengenai andil negara Rusia dalam menjamin ekonomi dan keamanan negara mereka.

Tidak seperti pada semua negara de facto lainnya di ruang pasca-Soviet, Rusia tidak memenuhi peran pelindung Nagorno-Karabakh, yang dalam hal ini adalah Armenia, dengan Azerbaijan menjadi negara induk Nagorno-Karabakh. Bagi Rusia, selalu penting untuk memiliki hubungan yang seimbang dengan Armenia dan Azerbaijan karena, Rusia memiliki diaspora Azerbaijan dan Armenia yang kuat, kedua, negara tersebut ingin mempertahankan kehadiran militer di Armenia, sementara memiliki hubungan baik dengan Azerbaijan yang berbatasan dengan wilayah Rusia Dagestan, yang merupakan perhatian keamanan yang tinggi ke Rusia.

Rusia juga tidak menginginkan memburuknya hubungan dengan salah satu dari keduanya dalam konteks hubungan yang sudah sangat tegang dengan negara Kaukasus Selatan ketiga yaitu Georgia. Pendekatan yang lebih disukai Rusia adalah agar Armenia dan Azerbaijan menyelesaikan sendiri perselisihan mereka, dengan Rusia bersedia menjadi mediator dan perantara daripada pendukung salah satu pihak.¹⁵

Baik Armenia maupun Azerbaijan membina hubungan dengan Rusia dan Barat, yang juga tercermin dalam kenyataan bahwa pendekatan terhadap konflik Nagorno-Karabakh tidak dipengaruhi oleh memburuknya hubungan Rusia-Barat. Oleh karena itu, mengenai Nagorno-Karabakh, masih ada konvergensi pendekatan Rusia dan Barat, yang merupakan kasus unik dalam keadaan hubungan kontemporer.

¹⁵ Carley, P. (1998). "Nagorno-Karabakh: Searching for a Solution". Peaceworks.

Ini telah tercermin dalam pendekatan kebijakan luar negeri Rusia dalam kasus khusus ini, yang konsisten sejak jatuhnya Uni Soviet, meskipun butuh beberapa waktu sampai menjadi lebih terkonsolidasi, seperti pada awal 1990-an, militer Rusia mengambil beberapa kebijakan luar negeri, ¹⁶langkah independen dari resmi Moskow. Keunikan posisi Rusia sejak awal adalah peran simultan negara itu sebagai mediator dan pemasok peralatan militer untuk kedua pihak yang bertikai. Meskipun Rusia telah menginvestasikan upaya yang cukup besar ke dalam resolusi konflik dan telah mencoba untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi kepentingannya, Rusia tidak mau atau tidak mampu memaksakan penyelesaian di pihak yang berkonflik

Setelah pembubaran Uni Soviet, Rusia mengambil langkah-langkah untuk menyeimbangkan keuntungan militer Azerbaijan dengan mengizinkan pasokan ke Armenia. Pada saat yang sama, Rusia memberikan nilai yang sangat tinggi pada upaya mediasi dan resolusi konflik, yang dianggap oleh Boris Yeltsin, Presiden Rusia saat itu, dan Andrei Kozyrev, Menteri Luar Negeri Rusia saat itu, sebagai hal penting bagi status internasional Rusia dan ambisinya untuk berintegrasi ke dalam sistem internasional.

Rusia menjadi terlibat dalam pekerjaan OSCE Minsk Group bersama-sama dengan Barat, meskipun pada saat itu, keduanya tidak dapat menemukan posisi yang sama dan dengan demikian, Rusia juga terlibat dalam upaya mediasi sendiri.

¹⁶ Jafarova, E. (2011). Achieving Security and Stability in the Region of South Caucasus: What Role for International Organizations?. Universitat Wien.

Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa sementara Rusia telah mempresentasikan inisiatif tertentu di luar Grup OSCE Minsk, inisiatif tersebut tidak pernah bertentangan dengan kegiatan Grup dan Prinsip-prinsip yang disepakati dalam kerangka kerjanya.

Meskipun upaya mediasi dan resolusi konflik awal Rusia gagal untuk membuat pihak-pihak melakukan gencatan senjata, itu adalah masukan dari Vladimir Kazimirova yang akhirnya mengamankan gencatan senjata pada 12 Mei 1994. Namun demikian, terlepas dari upaya Rusia yang tak kenal lelah, sebuah kesepakatan politik pada penyelesaian konflik tidak dapat dicapai dan Rusia telah selama bertahun-tahun berulang kali, namun tidak berhasil, berusaha untuk mengirim misi penjaga perdamaian ke Nagorno-Karabakh, yang akan meningkatkan kehadiran dan pengaruhnya di wilayah tersebut, memuaskan kepentingan nasional Rusia dan pencarian keamanan ontologis. lebih luas daripada status quo.¹⁷

Di bawah Menteri Luar Negeri Yevgeny Primakov, kepentingan Rusia terhadap ruang pasca-Soviet menjadi lebih terkonsolidasi dan sistematis, bertujuan untuk meningkatkan pengaruh, integrasi, dan upaya penyelesaian konflik di ruang pasca-Soviet. Pada tahun 1997, dua peristiwa penting terjadi: pertama, Azerbaijan menjadi anggota pendiri kelompok GUAM yang dinilai oleh Rusia sebagai tujuan untuk menahannya.

¹⁷ Kucera, J. (2014, Agustus 4). Bloody clashes between Azerbaijan and Armenia over disputed territory. The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/04/nagorno-karabakh-clashes-azerbaidjanarmenia>. Diakses tanggal 24 November 2021

Kedua, Rusia memperluas hubungan militernya dengan Armenia, meskipun memastikan bahwa itu sama sekali tidak ditujukan terhadap Azerbaijan. Dari pihak Rusia, itu adalah langkah strategis reaktif yang melayani tujuannya untuk mengamankan pengaruh dan kehadiran militer di ruang pasca-Soviet, yang harus ditafsirkan dalam konteks hubungan yang memburuk secara bertahap dengan negara Kaukasus Selatan ketiga - Georgia.¹⁸

Pada tahun 2000-an, Rusia mempertahankan peran aktifnya dalam penyelesaian konflik. Dengan ketua bersama lain dari OSCE Minsk Group, mereka menyusun Prinsip Madrid yang diadopsi pada tahun 2007 dan, dalam versi 2009 yang diperbarui, sejak itu menjadi landasan upaya penyelesaian konflik, dipatuhi oleh semua mediator.

Namun demikian, prakarsa Luar Kelompok-Minsk dari Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang memuncak pada KTT Kazan 2011 yang dihadiri oleh Presiden Armenia Serzh Sargsyan dan mitranya dari Azerbaijan Ilham Aliyev, tidak mengakibatkan pihak-pihak menandatangani dokumen yang mengikat mereka untuk mengikuti prinsip-prinsip ini. Setelah itu, Moskow mengurangi upaya resolusi konflik pro-aktifnya. Pada akhir Juli 2014, ketika kekerasan paling mematikan sejak perjanjian gencatan senjata 1994 meletus di jalur kontak Nagorno-Karabakh, mediasi Rusia sekali lagi turun tangan untuk meredakan situasi.

¹⁸ Garibov, A. (2015). OSCE and Conflict Resolution in the Post-Soviet Area: The Case of the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict. Caucasus International.

Pada 2015, Rusia mengajukan apa yang disebut Rencana Lavrov dan ketika perang empat hari pecah pada April 2016, ketika pasukan Azerbaijan dan Armenia mulai bertempur di garis kontak, Rusia lah yang membantu meredakan situasi dengan menengahi gencatan senjata. Rencana Lavrov kembali dibahas dan sementara Azerbaijan bersedia mempertimbangkannya, menghilangkan penentangan terhadap penjaga perdamaian Rusia, Armenia menolaknya karena ketidakjelasan ketentuan tentang status akhir Nagorno-Karabakh. Selama bertahun-tahun, keterbukaan Azerbaijan dan Armenia terhadap misi penjaga perdamaian Rusia semata-mata telah memudar dan kemajuan dalam penyelesaian konflik belum tercapai.

Untuk waktu yang lama, Rusia telah mempertahankan kontak dekat dengan para pemimpin Armenia dan Azerbaijan. Moskow belum mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan revisionis demi mendukung perubahan perbatasan atau mengakui Nagorno-Karabakh, dan kemungkinan konflik meningkat. Oleh karena itu, kedua belah pihak menghargai kontribusi mediasi Rusia, yang juga telah ditunjukkan dalam situasi saat ini. Perubahan penting di kawasan itu, yang telah mengurangi pengaruh Rusia pada konflik dan dengan demikian menyebabkan periode bentrokan bersenjata yang berkepanjangan.¹⁹

¹⁹ Pashayeva, S. B. (2016). "The U.S. Foreign Policy Towards the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict". SAM Review. Hal 235-241.

Pada 27 September 2020, konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah. Konflik Nagorno-Karabakh bisa pecah karena pihak Armenia menuduh bahwa pihak Azerbaijan melakukan serangan di Kota Vardenis, Armenia, sebaliknya Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim bahwa pihak Armenia yang lebih dulu melakukan penyerangan di Kota Dashkasan, Azerbaijan. Imbas dari saling tuduh-menuduh ini Azerbaijan dan Armenia melakukan pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh. Adanya konflik antara negara tersebut mengundang perhatian para aktor internasional. Aktor internasional yang intensif terlibat di dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah Turki dan Rusia.

Secara spesifik, di dalam konflik ini Rusia memainkan perannya sebagai pihak mediator ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melakukan kesepakatan bersama Armenia dan Azerbaijan pada 10 Oktober 2020. Namun, mediasi tersebut gagal karena Azerbaijan menyerang kembali kota Stepanakert di wilayah Nagorno-Karabakh. Dengan demikian, konflik Nagorno-Karabakh bisa berakhir ketika adanya proses perdamaian Rusia memainkan peran atas proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh.

Rusia berhasil mengakhiri konflik dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020. Kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin juga melakukan kesepakatan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan untuk mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pada 10 November 2020 (Presidency of The Republic of Türkiye, 2020).

Kesepakatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembentukan pusat tersebut oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada 11 November 2020 (Republic of Turkiye Ministry of National Defence, 2020). Pusat Gabungan Rusia- Turki diresmikan oleh Menteri Pertahanan Azerbaijan Zakir Hasanov, Wakil Menteri Pertahanan Turki Yunus Emre Karaosmanoglu, dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin pada 30 Januari 2021 (Republic of Turkiye Ministry of National Defence, 2020).

Pasca penandatanganan perjanjian perdamaian pada 10 November 2020, Kremlin memutuskan bahwa pemerintah Rusia akan mengerahkan pasukan perdamaianya, terdiri dari 1.960 tentara bersenjata senjata api, 90 kendaraan lapis baja, dan 380 kendaraan bermotor dan unit peralatan khusus, di sepanjang jalan telah dikerahkan. saluran kontak di Nagorno-Karabakh dan di sepanjang Koridor Lachin.

Dalam tiga tahun ke depan, rencana konstruktif akan diuraikan untuk pembangunan rute baru melalui Koridor Lachin, untuk menyediakan hubungan antara Nagorno-Karabakh dan Armenia, dan pasukan perdamaian Rusia akan selanjutnya direlokasi untuk melindungi rute. Pasukan perdamaian Federasi Rusia akan dikerahkan selama lima tahun, jangka waktu yang akan ditambahkan dalam waktu lima tahun yang akan datang. Di Kaukasus Selatan, selama 32 tahun, Rusia mengamankan gencatan senjata tetapi sayangnya gagal mengamankan perdamaian dan stabilitas regional, sebagai kepentingan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas penulis memahami bagaimana permasalahan yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia yang melalui proses kesepakatan yang cukup panjang dan sulit dipecahkan dengan adanya peranan dari Rusia. Dalam menentukan sebuah topik penelitian, penulis sebagai peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah terkait topik yang akan penulis kaji, yaitu: faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik Nagorno-Karabakh melibatkan Rusia hingga 5 tahun kedepan sejak tahun 2020 adanya kesepakatan perdamaian.

Penjaga perdamaian Rusia memicu berbagai reaksi antara Azerbaijan dan Armenia, termasuk Turki. Perdebatan Rusia yang mengirim pasukan militer di perbatasan atau wiayah yang telah berhasil direbut Azerbaijan, tentang situasi normalisasi kedua negara itu, tentang hasil perjanjian, dan peran Rusia dalam stabilitas pasca konflik. Faktor-faktor di balik kedudukan Rusia di wilayah Nagorno-Karabakh, dan kepentingan nasional Rusia sangat diperhatikan merupakan salah satu faktor-faktor penyebab dari penelitian ini.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah dampak kedudukan Rusia 5 tahun mendatang yang menyebabkan Azerbaijan dan Armenia menjadi rentan, *why*: kedudukan itu karena menjaga adanya serangan kembali dan kepentingan Rusia di wilayah Nagorno-Karabakh. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis membuat sebuah pertanyaan penelitian atau *research question* yang berbunyi: **“Bagaimana kepentingan Rusia pada konflik Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia tahun 2020-2022?.**

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan permasalahan yang dikemukakan, alasan penulisan proposal ini adalah untuk:

- 1) Menjelaskan kondisi Azerbaijan dan Armenia terhadap peranan Rusia pasca konflik
- 2) Menjelaskan bagaimana kepentingan Rusia di Nagorno-Karabakh
- 3) Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari efektifitas pasukan penjaga perdamaian Rusia 5 tahun mendatang pasca konflik antara Azerbaijan dan Armenia tahun 2020 atas wilayah Nagorno-Karabakh

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita mengenai bagaimana cara Rusia mengendalikan kepentingannya di Nagorno-Karabakh
 - b. Untuk menjadi bahan teoritis demi kepentingan penulisan karya ilmiah
- 2) Secara Praktis
 - a. Bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional khususnya jurusan Hubungan Internasional

- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui sejarah wilayah Nagorno-Karabakh, sejarah Rusia dan juga bagaimana cara Rusia mengendalikan kepentingannya di Nagorno-Karabakh.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab yang menjelaskan setiap bagian yang diperlukan dalam penelitian. Setiap bagian tersebut memiliki perannya dalam menjelaskan bagian yang dapat membangun logika pemikiran dan juga memberikan gambaran berupa alur pembatasan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

Dimana Bab Pertama terdiri dari pendahuluan yang mengkaji sejarah konflik untuk memahami masa kini dan masa depan pasca konflik, penting untuk mengetahui masa lalunya. Dari masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian menjelaskan perjalanan Rusia menangani konflik sengketa wilayah yang mengakibatkan hingga terjadinya perang dan berhasil menghasilkan kesepakatan berdamai antara Armenia dan Azerbaijan yang ditengahi Rusia.

Pada Bab Kedua terdiri dari Kajian Pustaka, yang mana berisikan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan ini. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai acuan untuk menambah informasi serta memberikan gambaran mengenai kedua teori yaitu Neo- Realisme dan Kepentingan

Nasional yang sesuai dengan pembahasan yang akan diangkat dalam bab ini dan juga nantinya akan digunakan dalam menganalisis masalah.

Pada Bab Ketiga berisi mengenai penggunaan metode serta jenis penelitian yang dilakukan dalam memahami kepentingan Rusia terkait pasca konflik sengketa wilayah yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan. Dimana penulis mengadopsi pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis juga memberikan penjelasan mengenai Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pemeriksaan keabsahan data, analisis data yang didalamnya terdiri dari pengolahan dan interpretasi data dalam penelitian.

Pada Bab Keempat berisi mengenai pemaparan data yang sudah ditemukan sebelumnya terkait dengan bagaimana Kepentingan Rusia masih terlibat pasca konflik Nagorno- Karabakh tahun 2020-2022. Bagian ini juga akan menjelaskan secara singkat sifat konflik dalam upaya untuk menunjukkan kompleksitasnya mengenai latar belakang. Mendalami keterkaitan Rusia serta hubungan yang terjalin terhadap kedua negara pasca perjanjian perdamaian. Proses segala bentuk perkembangan dan stabilitas pasca konflik dari peranan Rusia.

Pada Bab Kelima berisi mengenai implementasi teori Kepentingan Nasional yang terjadi dalam proses stabilisasi di wilayah Nagorno- Karabakh. Menelaah dalam beberapa aspek yang dilakukan Rusia setelah adanya kesepakatan damai antara Azerbaijan dan Armenia.

Selanjutnya Bab Keenam dari penelitian ini yaitu berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga analisis mengenai peranan Rusia yang terjadi di wilayah Nagorno- Karabakh pasca konflik tahun 2020-2022 terhadap kepentingan nasional kedua negara antara Azerbaijan dan Armenia. Sehingga dapat memberikan jawaban terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Yang mana hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kepentingan Rusia pada Azerbaijan dan Armenia.

